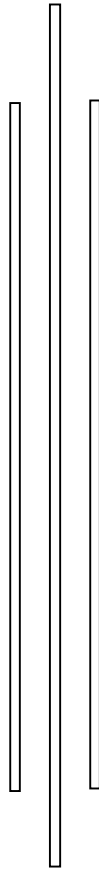




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2014

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab 1

Laporan Realisasi Anggaran..... ...

Neraca

Catatan Atas Laporan Keuangan

- BAB I Pendahuluan

- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja ...

- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan..... ...

- BAB IV Kebijakan Akuntansi

- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan..... ...

- BAB VI Penjelasan Tambahan

Lampiran – lampiran

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, 2015
Kepala Badan PKAD Kabupaten Blitar

Drs. MAHADHIN C.U.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19621201 199003 1 009

SKPD.....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(diganti Print out Simda)

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2014;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2014)

SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(diganti Print out Simda)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2014 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2014 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.28.001.470.646,29 mencapai , 14616% dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp10.913.573.202,00 atau mencapai 38,42% dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2014 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp..107.976.148.455,01 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.1.005.523.901,22 investasi jangka panjang sebesar Rp.0,00 aset tetap sebesar Rp.106.517.438.053,79 dana. cadangan Rp0,00 dan aset lainnya sebesar Rp.453.186.500,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.0,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.0,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0.00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.107.976.148.455,01 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp.1.005.523.901,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp.106.970.624.553,79, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp.0,00

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkandi bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2014, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar mempunyai 7 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
- e. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab / Kota;
- g. Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan sebesar Rp 48.104.208.557,50 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	19.697.449.298,00
2	Belanja Operasi	27.844.302.259,00
3	Belanja Modal	562.457.000,00
	Surplus/(Defisit)	8.709.309.961,50

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 Nomor 4 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp.48.104.208.557,50 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp.28.406.759.259,50 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp0 19.697.449.298,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	19.697.449.298,00	28.001.470.646,29	142,16
	- <i>Pendapatan Asli Daerah</i>	19.697.449.298,00	28.001.470.646,29	142,16
	- <i>Pendapatan Retribusi Daerah</i>	1.902.198.110,00	1.835.497.806,00	96,49
	- <i>Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</i>	2.104.500.000,00	1.607.683.600,95	76,39
	<i>Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</i>	15.690.751.188,00	24.558.289.239,34	156,51
2	Belanja	28.406.759.259,50	10.913.573.202,00	38,42
	- <i>Belanja Operasi</i>	27.844.302.259,50	10.435.693.452,00	37,48
	- <i>Belanja Modal</i>	562.457.000,00	4777.879.750,00	84,96
	- <i>Belanja Tak Terduga</i>	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	8.709.309.961,50	17.087.897.444,29	196,20

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2014 mencapai hasil 142,16 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dicapai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal yaitu sebesar Rp.28.001.470.646,29 dari target sebesar Rp.19.697.4449.298,00 atau 142,16 persen.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2014 sebesar Rp.10.913.573.202,00 atau 38,42 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.17.493.186.057 atau 61,58 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung	18.566.612.609,50	2.716.275.881,00	14,63
2	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	932.550.000,00	779.878.882,00	83,64
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Asset Pem. Kab	157.265.500,00	150.823.500,00	95,90
4	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	773.150.000,00	583.600.750,00	75,48
5	Pendidikan dan Latihan Formal	155.000.000,00	74.885.300,00	48,31
6	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	243.342.150,00	243.342.150,00	100
7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Laporan Kinerja dan Keuangan	20.325.000,00	19.825.000,00	97,54
8	Penyusunan Analisa Standar Belanja	45.765.700,00	22.815.700,00	49,85
9	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemda	70.000.000,00	56.682.968,00	80,98
10	Penyusunan Ran Perda Tentang Perubahan APBD	371.192.500,00	345.278.400,00	93,02
11	Penyusunan Ran Perbup Tentang Penjabaran P.APD	398.987.500,00	375.271.200,00	94,06
12	Penyusunan Ran Perda Tentang Pertanggungjawaban APBD 2013	287.462.700,00	264.150.000,00	0,00
13	Penyusunan RAN Perbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2013	295.250.000,00	281.082.899,00	95,20
14	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah	132.218.500,00	97.775.100,00	73,95
15	Sosialisasi PP Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	135.500.000,00	75.854.182,00	55,98
16	Peningkatan Pelayan Dan Fasilitasi Penerimaan Daerah	145.000.000,00	143.952.450,00	99,28
17	Peningkatan Pelayanan Dan Fasilitasi Pencairan Dana Keg. Seluruh SKPD Se Kab. Blitar	365.985.000,00	365.331.000,00	99,82
18	Penata Usahaan Akuntansi Atas Pelaksanaan APBD 2014	125.000.000,00	115.822.700,00	92,66
19	Penyelenggaraan Monitoring Dan Pelaporan Transfer Dari PemPus	148.500.000,00	148.052.440,00	99,70
20	Penyediaan Komponen Dan Jasa Administrasi Pengelolaan Kas	57.500.000,00	53.459.000,00	92,97
21	Ferivikasi RKA, DPA, DPPA, SATKER PEMDA	79.797.500,00	67.064.500,00	84,04
22	Penyusunan Penata Usahaan	177.258.500,00	165.978.800,00	93,64

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
23	Pelaksanaan APBD Pengelolaan Dan Penata Usahaan Gagi PNSD	601.867.600,00	525.662.000,00	87,34
24.	Penyunan Ranperda dan Ranperbip ttg APBD 2013	541.602.500,00	530.811.350,00	98,01
25	Sosialisasi PP Perundang Undangan Pengelolaan Keuangan	114.477.500,00	98.546.500,00	86,08
26	Penyusunan Ranperda dan Ranperbup ttg APBD 2014	153.691.300,00	141.963.300,00	92,37
27	Penyusunan Perbup ttg Pedoman pemberian Hibah dan Bansos	48.374.500,00	44.947.500,00	92,92
28	Penyusunan Stadar Biaya Umum	460.107.700,00	407.357.700,00	88,54
29	Penyusunan SOP BPKAD	258.293.700,00	231.862.700,00	89,77
30	Penatausahaan Belanja tidak Langsung PPKD	84.000.000,00	67.300.000,00	80,12
31	Penyusunan Perda ttg Pokok- pokok Pengelolaan Keu Daerah	161.384.600,00	150.471.300,00	93,24
32	Bimtek Kebijakan Akutansi Pemda	100.000.000,00	29.242.000,00	29,24
33	Penyusunan Sistem Akutansi Pemda dan BAS	80.000.000,00	69.339.000,00	86,67
34	Pembinaan dan pengelolaan Keuangan Daerah se Kab	88.781.000,00	69.981.000,00	78,82
35	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. BLT	223.341.700,00	222.227.450,00	99,50
36	Pembuatan S P D	71.000.000,00	69.819.000,00	98,34
37	Monitoring bdan evaluasi pelaksanaan Peng Keu di Wilyah	20.000.000,00	8.980.000,00	44,90
38	Penyelesaian TPTGR	116.534.500,00	106.990.000,00	91,81
39	Penyelesaian Permasalahan Tanag Asset Pemkab Blitar	34.266.500,00	30.321.500,00	88,49
40	Pelaksanaan Penghapusan Barang milik Daerah	134.650.500,00	125.391.500,00	93,12
41`	Operasional Pengelolaan Tanah eks Bengkulu di Kelurahan	88.042.500,00	80.867.500,00	91,85
42	Pendataan dan penilaian Asset Pemkab Blitar	759.180.000,00	387.463.700,00	51,04
43	Pensertifikatan Tanah dan pengamanan Asset Pemda	252.700.000,00	173.175.100,00	68,53
44	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah	126.100.000,00	120.584.300,00	95,63
45	Penyusunan Standar Harga	115.900.000,00	40.755.000,00	35,16
46	Pembinaan penyimpan dan pengurus Barang SKPD	88.800.000,00	32.200.000,00	36,26
	Jumlah	28.406.759.259,50	10.913.573.202,00	38,42

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain : (diisi sesuai dengan hambatan dan kendala yang ada dimasing-masing SKPD)

- Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.
- Kurangnya Sosialisasi Tentang Program-program Prioritas Pemerintah Kabupaten Blitar

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2014 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan persediaan sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
a. Aset	107.976.148.455,01	109.085.368.024,75
Saldo Aset SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp,107.976.148.455,01 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(1)	Aset Lancar	1.005.523.901,22	928.569.441,70
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	106.517.438.053,79	107.707.984.083,05
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	453.186.500,00	448.814.500,00
Jumlah Aset		107.976.148.455,01	109.085.368.024,75

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Lancar	1.005.523.901,22	928.569.441,70
Saldo Aset Lancar SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.005.523.901,22 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Kas	826,00	1.652,00
(b)	Piutang	3.814.754,00	24.281.310,00
(c)	Piutang lain-lain	1.124.539.899,62	1.032.532.599,00
(d)	Persediaan	8.207.500,00	10.306.700,00
(e)	Penyisihan piutang tidak tertagih	(131.039.078,40)	(138.552.819,30)
Jumlah		1.005.523.901,22	928.569.441,70

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(a) Kas	0,00	0,00

Saldo Kas SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(b) Piutang Retribusi	3.814.754,00	24.281.310,00

Saldo Piutang Retribusi SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.814.754,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Retribusi Daerah	3.814.754,00
2		0,00
3		0,00
Jumlah		3.814.754,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(c) Piutang lain-lain	1.124.539.899,62	1.032.532.599,00

Saldo piutang lain-lain SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.124.539.899,62 terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang hasil Penjualan Barang Milik Daerah	834.600.000,00
2	Piatang Bunga Pinjaman	186.926.201,00
3	Piutang kurang bayar bunga deposito	103.013.698,62
Jumlah		1.124.539.899,62

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(d) Persediaan	8.207.500,00	10.306.700,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD BPKAD Kabupaten Blitar.yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD BPKAD Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2014 sebesar Rp8.207.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	2.959.350,00
(2)	Alat listrik	1.427.000,00
(3)	Bahan pembersih	527.500,00
(4)	Obat-obatan	0,00
(5)	Bahan pakaian dinas	0,00
(6)	Benda pos	900.000,00
(7)	Materai	0,00
(8)	Amplop	0,00
(9)	Bahan makanan pasien	0,00
(10)	Alat kebersihan	269.500,00
(11)	Karcis	0,00
(12)	Persediaan barang cetakan	2.124.150,00
(13)	Stiker	0,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(14)	Blangko, Map dan kertas kop	0,00
(15)	Lenen	0,00
(16)	Alat kesehatan	0,00
(17)	Bahan Radiology	0,00
(18)	Alat Kontrasepsi	0,00
	Jumlah	8.207.500,00

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
2) Investasi Jangka Panjang	0,00	,00

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
3) Aset Tetap	106.517.438.053,79	107.707.984.083,05

Komposisi dan nilai saldo Aset TetapSKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp.107.707.984.083,05 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp106.517.438.053.053,79 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Tanah	82.611.903.259,00	86.054.451.259,00
(b)	Peralatan dan Mesin	3.409.905.394,74	3.076.807.423,00
(c)	Gedung dan Bangunan	20.291.051.600,05	18.371.347..601,05
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	204.577.800,00	204.577.800,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	,00	800.000,00
(f)	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset		106.517.438.053,79	107.707.984.083,05

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 107.707.984.083,05diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp106.517.438.053,79-Rp,107.707.984.083,05)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2014</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>
(a) Tanah	82.611.903.259,00	86.054.451.259,00

Saldo TanahSKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp82.611.903.259,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **86.054.451.259,00**

Penambahan Aset Tetap Tanah

Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang dan	0.00

Jasa		
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(3.422.800.000,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(19.848.000,00)	+
Jumlah Pengurangan		(3.442.548.000,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		82.611.903.259,00

Rincian perolehan aset tetap tanah dapat dilihat pada Lampiran 7 *Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	3.409.905.394,74	3.076.807.423,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.389.030.394,74 dengan perincian sebagai berikut. Rincian dapat dilihat pada *lampiran mutasi aset tetap 2014*

Saldo Awal Per 1 Januari 2014	3.076.807.423,00
--------------------------------------	-------------------------

Penambahan Peralatan dan Mesin

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	376.279.750,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	9.850.000,00	
Reklasifikasi	16.975.000,00	
Koreksi	25.522.083,74	+

Jumlah penambahan	428.626.833,74
Pengurangan Peralatan dan Mesin	
Penghapusan	(0,00)
Mutasi	(0,00)
Hibah	(0,00)
Reklasifikasi	(21.847.000,00)
Koreksi	(73.681.862,00) +
Jumlah Pengurangan	(95.528.862,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014	3.409.905.394,74

Rincian perolehan asset tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 8
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	20.291.051.600,05	18.371.347.601,05

Saldo gedung dan bangunan SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp20.291.051.600,05 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **18.371.347.601,05**

Penambahan Gedung dan Bangunan

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00

Belanja Modal 0,00

Hibah 0,00

Mutasi 0,00

Reklasifikasi 0,00

Koreksi 1.818.103.999,00 +

Jumlah penambahan **1.919.703.999,00**

Pengurangan Gedung dan Bangunan

Penghapusan (0,00)

Mutasi (0,00)

Hibah (0,00)

Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		20.291.051.600,05

Rincian perolehan asset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 9 *Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014*

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	204.577.800,00	204.577.800,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD .BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp204.577.800,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014	204.577.800,00
--------------------------------------	-----------------------

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00) +	
Jumlah Pengurangan		(0,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014	204.577.800,00
---	-----------------------

Rincian perolehan asset tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi dapat dilihat pada Lampiran 10 *Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	0,00	800.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **800.000,00**

Penambahan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00 +	
Jumlah penambahan		0,00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(800.000,00) +	
Jumlah Pengurangan		(800.000,00) +

Saldo Akhir Per 31 Desember 2014 **0,00**

Rincian perolehan asset tetap lainnya dapat dilihat pada Lampiran 11 *Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014*

	<u>31 Desember 2014</u> (Rp)	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo aset tetap berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

Saldo kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014(sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KONSTRUKSI	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Misal: Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi	0,00	0,00
2			
	JUMLAH	0,00	0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00
Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00		
	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
5) Aset Lainnya	453.186.500,00	448.814.500,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp448.814.500,00 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp453.186.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	448.314.500,00	448.314.500,00
(b)	Aset Lain-lain	4.872.000,00	500.000,00
Jumlah Aset		453.186.500,00	448.814.500,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 448.814.500,00diperoleh dari jumlah total aset tahun 2014 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2013 (Rp453,186.500,00-Rp448.814.500,00)dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	448.314.500,00	448.314.500,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp448.314.500,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **448.314.500,00**

Penambahan Aset Tak Berwujud

 Belanja Pegawai

 Belanja Barang dan
 Jasa

 Belanja Modal

 Hibah

 Mutasi

Reklasifikasi	0,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan		0,00
Pengurangan Aset Tak Berwujud		
Penghapusan	(0,00)	
Mutasi	(0,00)	
Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(0,00)	+
Jumlah Pengurangan		(0,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		448.314.500,00

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
(b) Aset Lain-lain	4.872.000,00	500.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014) sebesar Rp4.872.000,00, terdiri dari (Ex :Aset Tetap yang rusak sebesar Rp0.00, Aset Tetap yang telah dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp000, , dengan perincian mutasi sebagai berikut.

Saldo Awal Per 1 Januari 2014 **500.000,00**

Penambahan Aset Lain-Lain

Belanja Pegawai	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	0,00	
Hibah	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	4.872.000,00	
Koreksi	0,00	+
Jumlah penambahan		4.872.000,00

Pengurangan Aset Lain-lain

Penghapusan	(0,00)
Mutasi	(0,00)

Hibah	(0,00)	
Reklasifikasi	(0,00)	
Koreksi	(500.000,00) +	
Jumlah Pengurangan		(500.000,00) +
Saldo Akhir Per 31 Desember 2014		4.872.000,00

Rincian saldo asset lain-lain sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

Nomor	Aset	Rusak	Hibah
1	<i>Misal:</i> Mebelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

Untuk perolehan aset tetap melalui Belanja modal tahun 2014 terdapat aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tersebut dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan digolongan dalam daftar aset dibawah batasan minimal kapitalisasi aset (Daftar Aset Ekstra Komptabel)dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Aset	Jumlah Unit	Rupiah
1	<i>Misal:</i> Mebelair		
2			
3			
Jumlah		0,00	0,00

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo KewajibanSKPD BPKAD Kabupaten Blitar per 31 Desember 2014adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD BPKAD Kabupaten Blitar. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)		0,00
(b)		0,00
(c)		0,00
Jumlah Hutang		0,00

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
c. Ekuitas Dana	107.955.273.455,01	109.085.368.024,75

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD BPKAD Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 sebesar Rp107.955.273.455,01 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	1.005.523.901,22	928.569.441,70

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.005.523.901,22dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	997.315.575,22
(b)	Cadangan Persediaan	8.207.500,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	826,00
(d)		0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		1.005.523.901,22

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	106.949.749.553,79	108.156.798.583,05

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD BPKAD Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp106.949.749.553,79 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	106.496.563.053,79
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	453.186.500,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		106.949.749.553,79

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD BPKAD Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
a. Pendapatan	28.001.470.464,29	24.351.852.645,49

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD BPKAD Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD BPKAD.. Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran2014 serta realisasi Tahun Anggaran2013, adalah sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
(1)	Pendapatan Asli Daerah	19.697.449.298,00	28.001.470.646,29	24.351.852.645,40
	- Pajak Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Retribusi Daerah.	1.902.198.110,00	1.835.497.806,00	1.923.152.499,00
	-Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.104.500.000,00	1.607.683.600,95	1.573.086.737,30
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.690.751.188,00	24.558.289.239,34	20.855.613.508,19
Jumlah		19.697.449.298,00	28.001.470.646,29	24.351.852.645,49

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
b. Belanja	10.913.573.202,00	12.248.820.868,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2014SKPD BPKADKabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2014 sebagai berikut.

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1) Belanja Operasi	10..435.693.452,00	11.318.427.868,00

Belanja Operasi SKPD BPKAD Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2014 Rp0,00dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
(a)	Belanja Pegawai	22.069.803.609,50	5.835.916.881,00	7.831.936.802,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	5.774.498.650,00	4.599.776.571,00	3,486.491.066,00
(c)	Belanja Modal	562.457.000,00	477.879.750,00	930.393.000,00
Jumlah		28.406.759.259,50	10.913.573.202,00	12.248.820.868,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD .BPKAD Kabupaten Blitar realisasi tahun 2014 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	18.566.612.609,50	2.716.275.881,00	4.933.598.802
	Gaji dan Tunjangan	18.052.237.000,00	2.549.543.519,00	4.109.692.226,00
	Tambahan Penghasilan PNS	419.265,704,00	95.400.000,00	145.638.000,00
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0.00	0,00	217.932.569,00
	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0.00	0,00	370.497.215,00
	Insentif Retribusi Penghasilan Daerah	95.109.905,50	71.332.362,00	89.838.792,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	18.566.612.609,50	2.716.275.881,00	9.188.929.028,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	3.503.191.000,00	3.119.641.000,00	2.898.338.000,00
	Honorarium PNS	2,425.345.000,00	2.160.310.000,00	2.179.305.000,00
	Uang Lembur	1.077.846.000,00	959.331.000,00	719.033.000,00
	Belanja Barang/Jasa	5.774.498.650,00	4.607.276.571,00	3.486.491.066,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	549.238.850,00	522.671.950,00	436.490.530,00
	Belanja Bahan/Material	125.000.000,00	124.512.000,00	0,00
	Belanja Jasa Kantor	731.990.000,00	530.829.712,00	291.564.695,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	195.600.000,00	66.671.000,00	59.960.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.061.400,00	705.342.600,00	574.194.475,00
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80,200.000,00	29.578.182,00	33.350.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman	337.767.000,00	227.139.300,00	162.844.200,00
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.000.000,00	54.700.000,00	35.815.000,00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	1.708.580.400,00	1.393.361.527,00	1.146.019.166,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00

	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	288.000.000,00	168.588.300,00	76.125.000,00
	Belanja Pemeliharaan	163.061.000,00	161.382.000,00	337.558.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi	675.000.000,00	600.000.000,00	332.570.000,00
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
	Belanja Transport Lokal Non PNS	0,00	0,00	0,00
	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	9.840.146.650,00	8.197.297.321,00	7.315.222.066,00
Jumlah 1 dan 2		28.406.759.259,50	10.913.573.202,00	12.248.820.868,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp.0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kegiatan/Belanja	Rupiah
1		
2		
Jumlah		

	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
2) Belanja Modal	477.879.750,00	930.393.000,00

Belanja Modal SKPD BPKAD Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2014 Rp 477.879.750,00 dengan rinciansebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	504.099.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2014	2013
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.500.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	91.000.000,00	86.675.000,00	26.782.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	108.515.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	203.875.000,00	184.500.000,00	160.831.000,00
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	91.750.000,00	53.579.750,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	108.456.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	10.410.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	56.832.000,00	43.425.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2	459.457.000,00	376.279.750,00	922.593.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	70.000.000,00	68.600.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3	103.000.000,00	101.600.000,00	0,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	562.457.000,00	477.879.750,00	930.393.000,00

Jumlah tersebut termasuk:

- Realisasi Belanja Modal 477.879.750,00 berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Peralatan dan Mesin Rp376.279.750,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp101.600.000,00*);
- Realisasi Belanja Modal berasal dari Belanja yang terdiri dari (*Ex : Belanja Peralatan dan Mesin Rp0,00 dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 yang seharusnya dibebankan pada Belanja Hibah*).

BAB VI

PENJELASAN TAMBAHAN

SKPD BPKAD pada penyusunan Laporan Keuangan 2014 telah melakukan penyesuaian rekening asset tetap sesuai dengan Permendagri 64 tahun 2013 untuk data neraca awal tahun 2014 sehingga asset tetap pada SIMDA dan SIMBADA dapat dibandingkan.

Proses perubahan Rekening Aset Tetap tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca Per 31 Desember 2013 (setelah Audit)
2. Hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah antara BPKAD dengan SKPD per 31 Desember 2013.
3. *Print Out* SIMBADA Rincian Barang Ke Neraca Tahun Anggaran 2013.

Adapun Berita Acara beserta Kertas Kerja penyesuaian rekening asset tetap terlampir

Blitar, Januari 2015
Kepala BPKAD Kabupaten Blitar

Drs. MAHADHIN C.U, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD
Jalan Telp.
B L I T A R

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal Tiga puluh satu Desember Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor tanggal ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas : Rp.

b.	Uang logam	:	Rp.
c.	SP2D/ alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	:	Rp.
d.	Saldo Bank	:	Rp.
e.	Surat Berharga lain	:	Rp.
	Jumlah	:	Rp.
	Saldo menurut buku	:	Rp.
	Perbedaan Positif/Negatif	:	Rp.
	Perbedaan karena :		

Yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran

Blitar, 31 Desember 2014
Yang memeriksa,
Pengguna Anggaran

NAMA LENGKAP
NIP.

NAMA LENGKAP
NIP.

Lampiran 2

Foto Copy Rekening Koran



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SKPD

Jalan Telp.
B L I T A R

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini tanggal Tiga puluh satu Desember Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Barang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.59 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Bendahara Barang

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor tanggal ditugaskan mengurus barang, berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti – bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami mendapatkan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2014:

No	Nama Persediaan	Nilai (Rp.)
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp.
2.	Persediaan Alat Listrik	Rp.
3.	Persediaan Material/Bahan	Rp.
4.	Persediaan Benda Pos	Rp.
5.	Persediaan Bahan bakar	Rp.
6.	Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp.
7.	Persediaan Barang Cetak	Rp.
8.	Persediaan Alat Kebersihan	Rp.
9.	Persediaan Barang Bantuan Modal	Rp.

Rincian hasil pemeriksaan fisik persediaan terlampir.

Blitar, 31 Desember 2014

Yang diperiksa,
Pengurus Barang

Yang memeriksa,
Pengguna Barang

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

NIP.

NIP.

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Persediaan Barang Habis Pakai
Per 31 Desember 2014

Daftar Persediaan Barang Habis Pakai Per 31 Desember 2014

No	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
	Persediaan Alat Tulis kantor				
	Persediaan Alat Tulis Kantor				
	Persediaan Alat Listrik				
	Persediaan Alat-alat Listrik				
	Persediaan Material/Bahan				
	Persediaan Bahan Baku Bangunan				
	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas				
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman				
	Persediaan Bibit Ternak				
	Persediaan Obat-obatan				
	Persediaan Bahan Kimia				
	Persediaan Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis				
	Persediaan Bahan Praktek/Pelatihan				
	Persediaan Bahan Material Lainnya				
	Persediaan Bahan Radiologi				
	Persediaan Lenen				
	Persediaan Bahan Pakaian Dinas				
	Persediaan Benda Pos				
	Persediaan Benda Pos, Perangko dan Materai				
	Persediaan Materai				
	Persediaan Kertas Segel				

	Persediaan Amplop				
	Persediaan Bahan Bakar				
	Persediaan Bahan Bakar Minyak				
	Persediaan Bahan Bakar Gas				
	Persediaan Bahan Makanan Pokok				
	Persediaan Bahan Makanan Logistik				
	Persediaan Bahan Makanan Pasien (RSUD)				
	Persediaan Barang Cetakan				
	Persediaan Karcis				
	Persediaan Buku Cetak				
	Persediaan Stiker				
	Persediaan Blangko				
	Persediaan Map				
	Persediaan Kertas Kop				
	Persediaan Amplop				
	Persediaan Alat Kebersihan				
	Persediaan Alat Kebersihan				

*) *Diisi sesuai keadaan yang ada dimasing-masing SKPD/ hilangkan item yang tidak ada*

Blitar, 31 Desember 2014
Yang memeriksa,
Pengguna Barang

Yang diperiksa,
Bendahara Barang

NAMA LENGKAP
NIP.

NAMA LENGKAP
NIP.

Lampiran 4

Lampiran Inventarisasi Aset Daerah Perolehan TA 2014

Lampiran 5

Daftar Inventarisasi Aset Daerah Extra Komptabel Perolehan 2014

Lampiran 6

Rincian Mutasi Aset Tanah 2014

Lampiran 7

Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2014

Lampiran 8

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2014

Lampiran 9

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2014

Lampiran 10

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 2014

Lampiran 11

Lain-lain:

- Memo Jurnal Penyesuaian/koreksi

- Bukti Penyesuaian/koreksi

Lampiran 12

Kertas Kerja Mapping Saldo Awal 2014